



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL
NOMOR : Kep- 65/Sesjen/X/2013**

TENTANG

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL TAHUN 2014**

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional untuk tahun anggaran 2014, perlu landasan dan pedoman agar dapat mencapai sasaran secara efektif dan efisien yang dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2014.
- Mengingat** :
 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
 4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014;
 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 7. Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2010 – 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL TENTANG RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL TAHUN 2014.
- KESATU : Mengesahkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang belum tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2014 ini akan diputuskan lebih lanjut.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 2 Oktober 2013



SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL

Waris
WARIS
LETNAN JENDERAL TNI



**LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL
NOMOR : Kep-65/Sesjen/X/2013**

TENTANG

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL
TAHUN 2014**

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi, di mana salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Sebagaimana Rencana Strategis Dewan Ketahanan Nasional 2010-2014 yang mengacu pada Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014 disebutkan bahwa target Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional sebagai salah satu instansi dalam lingkup Pembangunan Bidang Pertahanan Keamanan dengan fokus prioritas: peningkatan kapasitas penyusunan Kebijakan Lembaga Keamanan Nasional, prioritas bidang: peningkatan kualitas kebijakan keamanan nasional, dengan indikator impact: peningkatan efektifitas pengelolaan keamanan nasional.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2014 merupakan penjabaran dari Renstra Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional 2010 – 2014, dan mengacu juga pada Perpres Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014. Sehingga RKT Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2014 memuat sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tahun 2014.

Pada tahun 2014, sasaran yang menjadi kewenangan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional adalah: Terlaksananya transformasi penentu kebijakan Ketahanan Nasional dalam rangka meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakan nasional yang terintegrasi, tepat sasaran, dan tepat waktu; Tersedianya rekomendasi kebijakan yang berkualitas akan berdampak pada presisi keputusan pimpinan negara dalam menyikapi dinamika sosial, politik, ekonomi, hukum, pertahanan dan keamanan. Dengan disusunnya RKT Tahun 2014 diharapkan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja Tahun 2014 dan sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan bidang pertahanan keamanan.

Jakarta, 2 Oktober 2013

Sekretaris Jenderal

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Dasar Hukum.....	2
BAB II ARAH DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SETJEN WANTANNAS 2014	3
A. Visi dan Misi Setjen Wantannas 2010-2014	3
B. Tujuan dan Target Setjen Wantannas 2010-2014	3
C. Arah Kebijakan dan Strategi Setjen Wantannas	4
D. Sasaran Pembangunan Setjen Wantannas 2014	5
E. Kebijakan Pembangunan Setjen Wantannas 2014	8
BAB III PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 2014.....	10
A. Program Pembangunan Tahun 2014.....	10
B. Rancangan Program dan Kegiatan Setjen Wantannas 2014	10
C. Rencana Kerja dan Anggaran Setjen Wantannas 2014	12
BAB IV PENUTUP	19
FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN	20
Formulir RKT Kedeputian Sistem Nasional	
Formulir RKT Kedeputian Politik dan Strategi	
Formulir RKT Kedeputian Jiandra	
Formulir RKT Kedeputian Pengembangan	
Formulir RKT Biro Keuangan	
Formulir RKT Biro Umum	
Formulir RKT Biro Persidangan dan Humas	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana pembangunan nasional tahap kedua pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu telah memasuki tahun terakhir pelaksanaan. Pemerintah secara konsisten terus melaksanakan strategi dan kebijakan pembangunan yang telah direncanakan sesuai dengan visi dan misi pembangunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Dokumen RPJMN 2010-2014 merupakan penjabaran dari visi dan misi Presiden terpilih yang memuat Strategi Pembangunan Nasional, Kebijakan Umum, Prioritas Nasional dan Program serta kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga. Dokumen ini menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana kerjanya.

Kedudukan Setjen Wantannas sebagai lembaga pemerintah berbeda dengan Kementerian/LPNK, dalam arti Setjen Wantannas melakukan pelayanan staf pada Ketua Wantannas bukan merupakan lembaga yang bersifat pelayanan publik. Setjen Wantannas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya lebih terfokus kepada pelaksanaan pemberian saran tindak kepada Presiden RI terkait telaahan berbagai masalah nasional krusial mendesak yang bersifat strategis pada aspek "*Defence, security, crisis prevention and resolution* yang diwujudkan dalam bentuk *day to day report, incidental report* dan *emergency report* serta berbagai telaahan strategis dan sumbangan bahan penetapan kebijakan/saran tindak untuk dibahas dalam sidang Dewan Ketahanan Nasional atau langsung menjadi bahan pengambilan keputusan Ketua Dewan Ketahanan Nasional tanpa harus melalui sidang pleno (bukan konsumsi publik).

Selanjutnya sebagai penjabaran RPJM 2010-2014 dan pelaksanaan Rencana Strategis Setjen Wantannas tahun 2010-2014 maka perlu disusun Rencana Kinerja Tahunan Setjen Wantannas tahun 2014 sebagai landasan dalam pelaksanaan pencapaian sasaran dan kegiatan tahun anggaran 2014.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kinerja Tahunan tahun 2014 adalah memberikan gambaran dan arahan tentang sasaran, kegiatan dan kemampuan dukungan anggaran yang tersedia.

2. Tujuan

Agar dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga kegiatan yang dilaksanakan lebih terarah kepada pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

C. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RKT Setjen Wantannas Tahun 2014 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2010 – 2014.

BAB II
ARAH DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
SETJEN WANTANNAS 2014

A. Visi dan Misi Setjen Wantannas 2010-2014

1. Visi

Menjadikan badan fasilitas staf bagi Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas), yang mampu memenuhi kebutuhan Ketua Wantannas dalam menyiapkan pilihan keputusan secara komprehensif integral tentang *defence, security, crisis prevention* dan *resolution* serta arahan-arahan lain dari Presiden dalam merespon dinamika kehidupan nasional.

2. Misi

- a. Menyediakan *optional decision* yang operasional dalam seluruh aspek kehidupan nasional yang terkait erat dengan ancaman tradisional dan non tradisional.
- b. Mengintegrasikan berbagai pemikiran dari jalur aspiratif, akademik, dan empirik secara komprehensif integral melalui proses lintas sektoral, lintas fungsional, dan lintas disiplin ilmu.
- c. Menyediakan *day to day report* berisi saran pengambil keputusan cepat menghadapi dinamika kehidupan nasional yang berubah serba cepat.
- d. Menyediakan informasi akurat, terpercaya, cepat melalui sistem informasi Setjen Wantannas yang *compatible* dengan sistem informasi K/LPNK dan sistem informasi pemerintah daerah.
- e. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan direktif Presiden selaku Ketua Wantannas kepada seluruh K/LPNK, Pemda Provinsi, Kab/Kota, serta kemungkinan risiko yang dihadapi.
- f. Memelihara seluruh sumber daya dan instrumen kelembagaan Setjen Wantannas untuk mendukung kelancaran tupoksi.

B. Tujuan dan Target Setjen Wantannas 2010-2014

Tujuan yang ingin dicapai Setjen Wantannas:

1. Tersedianya *optional decision* yang operasional dalam seluruh aspek kehidupan nasional yang terkait erat dengan ancaman tradisional dan non tradisional, untuk setiap tahun anggaran berjalan ditetapkan topik-topik/isu-isu strategis yang diperkirakan timbul berdasarkan analisis/telaahan strategis.
2. Tersedianya *day to day report* berisi saran pengambil keputusan cepat menghadapi dinamika kehidupan nasional yang berubah serba cepat, dilakukan melalui monitoring dan evaluasi setiap hari memanfaatkan fasilitas sistem informasi Setjen Wantannas yang ada dan diawasi secara

bergantian oleh pejabat pemikir dan pendukung sesuai dengan surat perintah Setjen Wantannas

3. Tersedianya informasi akurat, terpercaya, cepat melalui sistem informasi Setjen Wantannas yang *compatible* dengan sistem informasi K/LPNK dan sistem informasi pemerintah daerah, idem dilaksanakan sesuai butir 2 di atas.
4. Terlaksananya monitoring terhadap pelaksanaan direktif Presiden selaku Ketua Wantannas kepada seluruh K/LPNK, Pemda Provinsi, Kab/kota, serta kemungkinan risiko yang dihadapi, idem dilaksanakan sesuai butir 2 di atas.
5. Terpeliharanya seluruh sumber daya dan instrumen kelembagaan Setjen Wantannas untuk mendukung kelancaran tupoksi, dijabarkan melalui program pembinaan organisasi (personel, materil, pendidikan-pelatihan, perkantoran, administrasi) dan pembinaan fungsi.

Selama satu tahun ke depan, dalam membangun ketahanan nasional, target Setjen Wantannas adalah:

1. Terumuskannya dokumen Kirstranas;
2. Terumuskannya dokumen Telstranas;
3. Terumuskannya dokumen Apstranas;
4. Terumuskannya dokumen Renkonnas;
5. Terumuskannya saran tindak pemecahan masalah krusial mendesak;
6. Terumuskannya saran tindak perkiraan cepat, dan;
7. Terumuskannya Kajian Kewilayahan.

C. Arah Kebijakan dan Strategi Setjen Wantannas

Setjen Wantannas dalam waktu 2010-2014, telah menetapkan 7 arah kebijakan ketahanan nasional, meliputi:

1. Meningkatkan kapasitas penyediaan bahan perumusan kebijakan nasional yang berkaitan dengan upaya pembinaan ketahanan nasional menyangkut bidang keamanan internal, keamanan eksternal maupun menghadapi kemungkinan dan upaya mengatasi akibat bencana berskala besar;
2. Menyelenggarakan perumusan kebijakan strategis dan pemantauan serta penilaian seluruh aspek kehidupan nasional tahun anggaran berjalan dan perkiraan kecenderungannya pada jangka pendek, jangka sedang dan jangka panjang dalam rangka menyusun sumbangan bahan untuk pemecahan masalah nasional krusial mendesak dan pembinaan ketahanan nasional selama tahun anggaran berjalan;
3. Mengoptimalkan dan mengembangkan kapasitas lembaga agar senantiasa mampu mendukung pelaksanaan tugas-tugas Setjen Wantannas selama tahun anggaran berjalan;

4. Peningkatan kualitas pelayanan sistem informasi untuk mendukung perumusan kebijakan keamanan internal, keamanan eksternal dan penanganan bencana berskala besar;
5. Melaksanakan studi kebijakan melalui pengkajian daerah dalam rangka memperoleh informasi tentang pelaksanaan dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam penyelenggaraan pembangunan;
6. Melaksanakan pengembangan hubungan kerjasama pengkajian dengan perguruan tinggi untuk memperoleh masukan penyelesaian suatu masalah Ketahanan Nasional secara akademik;
7. Melaksanakan kajian Luar Negeri ke beberapa negara yang memiliki lembaga *National Security Council* semacam Dewan Keamanan Nasional dalam rangka pengembangan organisasi Wantannas.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Wantannas ditempuh langkah-langkah strategi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebagaimana telah dialokasikan melalui RKA-KL TAB secara efektif dan efisien meliputi:
 - a. Perencanaan Program dan Pengelolaan Administrasi Keuangan termasuk Pembayaran Gaji dan Tunjangan personel sesuai dengan hak anggota berdasarkan jabatan, kepangkatan dan kelas jabatan kinerja;
 - b. Pelayanan Persidangan dan Hubungan Masyarakat;
 - c. Pelayanan Tata usaha dan Administrasi Umum;
 - d. Pembinaan Administrasi Kepegawaian Wantannas;
 - e. Pengelolaan Asset Wantannas.
2. Menyelenggarakan Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional, melalui telaahan kajian berbagai dinamika aspek kehidupan nasional ditinjau dari aspek bidang sistem nasional, bidang politik dan strategi, bidang pengkajian dan penginderaan, dan bidang pengembangan serta pemutakhiran sistem informasi Wantannas.

D. Sasaran Pembangunan Setjen Wantannas 2014

Sasaran pembangunan kewenangan Wantannas sesuai dengan Perpres Nomor 5 tahun 2010 tentang RPJMN tahun 2010-2014 adalah: Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan nasional dibidang keamanan nasional yang terintergrasi, tepat sasaran, dan tepat waktu; Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan akan dampak pada efektifitas keputusan kebijakan nasional dalam menyikapi dinamika ideologi, politik ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.

Sasaran pembangunan kewenangan Wantannas sesuai dengan Perpres Nomor 39 Tahun 2013 tentang RKP tahun 2014 adalah: Terlaksananya transformasi penentu kebijakan Ketahanan Nasional dalam rangka meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakan nasional yang terintegrasi, tepat sasaran, dan

tepat waktu; Tersedianya rekomendasi kebijakan yang berkualitas akan berdampak pada presisi keputusan pimpinan negara dalam menyikapi dinamika sosial, politik, ekonomi, hukum, dan pertahanan dan keamanan.

Sesuai dengan sasaran jangka menengah dan tahunan tersebut diatas, maka sasaran yang ingin dicapai Setjen Wantannas Tahun 2014 adalah:

1. Biro Keuangan

Sasaran yang ingin dicapai Biro Keuangan pada Tahun Anggaran 2014 adalah terselenggaranya perencanaan anggaran dan administrasi keuangan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen Wantannas melalui upaya pembinaan anggaran dan keuangan sebagai berikut :

- a. Bagian Perencanaan Anggaran
 - 1) Terselenggaranya penyusunan rencana program dan anggaran;
 - 2) Terselenggaranya pengawasan dan evaluasi program dan anggaran.
- b. Bagian Administrasi Keuangan
 - 1) Terselenggaranya tertib administrasi pertanggungjawaban keuangan;
 - 2) Tersusunnya laporan keuangan Setjen Wantannas.

2. Biro Persidangan dan Humas

Sasaran yang ingin dicapai pada Biro Persidangan dan Humas pada Tahun Anggaran 2014 adalah: (1) Terselenggaranya pengelolaan persidangan dan kehumasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok Setjen Wantannas; (2) Terselenggaranya pengelolaan rapat koordinasi sidang Wantannas; dan (3) terselenggaranya pengelolaan jalur komunikasi data yang aman dan mutakhir dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok Setjen Wantannas, melalui upaya sebagai berikut:

- a. Bagian Persidangan
 - 1) Terselenggaranya pengelolaan dan penatausahaan layanan persidangan;
 - 2) Tersedianya bahan/materi hasil sidang yang telah diselenggarakan.
- b. Bagian Hubungan Masyarakat
 - 1) Terselenggaranya pengelolaan dan penatausahaan layanan kehumasan;
 - 2) Terlaksananya dukungan kegiatan hubungan media, hubungan lembaga dan publikasi;
 - 3) Terlaksananya dukungan kegiatan kearsipan, perpustakaan dan info media;

- 4) Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan infrastruktur sisfo Setjen Wantannas.

3. Biro Umum

Sasaran yang ingin dicapai Biro Umum pada Tahun Anggaran 2014 adalah terlaksananya penyelenggaraan administrasi kepegawaian, kerumah-tanggaaan dan administrasi umum melalui upaya sebagai berikut:

- a. Bagian Kepegawaian
 - 1) Terpenuhinya Daftar Susunan Personel (DSP);
 - 2) Terwujudnya penilaian dan peningkatan kemampuan SDM;
 - 3) Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian;
 - 4) Terselenggaranya pengelolaan tata naskah kepegawaian dan dokumen kepegawaian;
 - 5) Terwujudnya tingkat disiplin pegawai;
 - 6) Terwujudnya data personil yang mutakhir dan valid.
- b. Bagian Rumah Tangga
 - 1) Terpenuhinya dukungan operasional perkantoran dan pemeliharaan asset;
 - 2) Terselenggaranya pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) yang transparan dan akuntabel;
 - 3) Terselenggaranya pengelolaan dan penatausahaan belanja pegawai.
- c. Bagian Administrasi Umum
 - 1) Terselenggaranya pengelolaan administrasi persuratan dan ekspedisi;
 - 2) Terlaksananya dukungan tata usaha pimpinan dan kesekretariatan.

4. Deputi Sistem Nasional

Sasaran yang ingin dicapai pada Tahun Anggaran 2014 adalah terselenggaranya kajian Dinamis secara komprehensif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen Wantannas, yang dilakukan melalui pengamatan, evaluasi, analisis dan perumusan sistem nasional serta penjabarannya ke dalam sub-sub sistemnya dalam rangka pembinaan ketahanan nasional sebagai bahan masukan kebijakan nasional kepada Presiden RI selaku Ketua Wantannas.

5. Deputi Politik dan Strategi

Sasaran yang ingin dicapai pada Tahun Anggaran 2014 adalah terselenggaranya kajian Siklis maupun Dinamis secara komprehensif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen Wantannas, yang

dilakukan melalui pengamatan, evaluasi, analisis dan perumusan politik strategi nasional serta rencana kontijensi.

6. Deputi Pengkajian dan Penginderaan

Sasaran yang ingin dicapai pada Tahun Anggaran 2014 adalah terselenggaranya kajian Siklis maupun Dinamis secara komprehensif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen Wantannas yang dilakukan melalui pengkajian dan penginderaan strategis nasional, regional, dan internasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional sebagai masukan dan saran tindak kepada Ketua Wantannas (Presiden RI).

7. Deputi Pengembangan

Sasaran yang ingin dicapai pada Tahun Anggaran 2014 adalah terselenggaranya kajian Dinamis secara komprehensif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen Wantannas, yang dilakukan melalui pengamatan, evaluasi, analisis dinamika segenap aspek kehidupan nasional dan pelaksanaan pembangunan nasional serta perumusan saran pemecahan krisis dan saran pemecahan masalah penyimpangan pembangunan nasional yang terjadi.

8. Perumusan kegiatan dan koordinasi Setjen Wantannas

Sasaran yang ingin dicapai pada Tahun Anggaran 2014 adalah terselenggaranya rapat koordinasi sidang dewan, reformasi birokrasi, dan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi (stranas PPK), serta kajian kewilayahan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen Wantannas, yang dilakukan melalui pengamatan, evaluasi, analisis dinamika segenap aspek kehidupan nasional dan pelaksanaan pembangunan nasional pada suatu daerah maupun negara lain dalam rangka pembinaan ketahanan nasional sebagai masukan dan saran tindak kepada Ketua Wantannas (Presiden RI).

E. Kebijakan Pembangunan Setjen Wantannas 2014

Kebijakan pembangunan Setjen Wantannas tahun 2014 dirancang sebagai bagian dan keberlanjutan dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Selain itu tentu saja kebijakan tersebut merupakan komponen dari RKP 2014, khususnya dalam menunjang salah satu prioritas pembangunan nasional, yaitu prioritas nomor enam berupa Peningkatan Kualitas Kebijakan Keamanan Nasional dalam kerangka pembangunan jangka menengah.

Berbagai kebijakan yang ditempuh dalam pembangunan Setjen Wantannas tahun 2014 adalah:

1. Mengerahkan seluruh komponen kekuatan Setjen Wantannas khususnya personel pemikir untuk melakukan telaahan baik yang bersifat siklis maupun dinamis disesuaikan dengan dinamika seluruh aspek kehidupan nasional.
2. Mengarahkan seluruh komponen kekuatan Setjen Wantannas agar mampu mengembangkan inisiatif, kemudahan untuk memperoleh akses peningkatan kapasitasnya, dan penguatan tupoksi yang bersangkutan.

3. Mengarahkan penguatan jejaring kepakaran melalui komunikasi konstruktif dan kemitraan strategis dengan para pakar yang mewakili jalur aspiratif (anggota DPR, LSM terpilih, pengamat/pemerhati), jalur akademik (para ilmuwan) dan jalur empirik (birokrat terpilih).
4. Mengarahkan seluruh sumber daya Setjen Wantannas agar mampu menunjang berbagai program kegiatan yang telah dirancang Renstra dan RKT secara efektif dan efisien.

BAB III

PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 2014

A. Program Pembangunan Tahun 2014

Prioritas pembangunan bidang pertahanan keamanan yang menjadi kewenangan Setjen Wantannas adalah peningkatan kapasitas penyusunan lembaga keamanan nasional, merupakan kumpulan dari kegiatan kegiatan yang dirancang dalam program untuk mencapai sasaran tertentu atau beberapa sasaran sekaligus. Program tersebut tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional. Hal ini dalam rangka harmonisasi/ keselarasan mulai dari RPJM, Renstra, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja.

Sesuai amanat reformasi perencanaan dan penganggaran, disebutkan bahwa program merupakan tanggung jawab unit Eselon-I dan dalam bentuk kegiatan yang menjadi tanggung jawab unit kerja di lingkungannya. Program menghasilkan *outcome*. Sedangkan kegiatan menghasilkan output yang mendukung pencapaian *outcome* program.

Setjen Wantannas pada tahun 2014 melaksanakan 2 Program Pembangunan Ketahanan Nasional. Masing-masing program pembangunan ketahanan nasional tersebut mencerminkan tugas pokok dan fungsi dari 4 unit Eselon-I lingkup Kedeputian Setjen Wantannas, dan 3 Unit Eselon II lingkup Kebiroan Setjen Wantannas. Ukuran keberhasilan Eselon-I lingkup kedeputian dalam menjalankan program tersebut diukur kinerjanya dalam bentuk *outcome*. Sebagaimana diketahui bahwa *outcome* merupakan hasil dari *output* kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja di bawahnya (eselon-II). Adapun 2 Program Pembangunan Ketahanan Nasional Tahun 2014 disajikan pada Tabel A.

Tabel A. Program Pembangunan Setjen Wantannas Tahun 2014

No.	Nama Program
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
2	Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional

B. Rancangan Program dan Kegiatan Setjen Wantannas 2014

Program pembangunan ketahanan nasional dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan. Pada masing-masing kegiatan dilaksanakan oleh unit kerja Eselon I dan Eselon II sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Kinerja keberhasilan unit kerja Eselon I, Eselon II dan unit kerja mandiri dalam melaksanakan kegiatan diukur dalam bentuk *output*. Penjabaran 2 program ke dalam 7 kegiatan, 7 Output, dan 5 sub output secara rinci disajikan pada Tabel B.

Tabel B. Rancangan Program dan Kegiatan Setjen Wantannas Tahun 2014

No.	Program/Kegiatan/Output/Suboutput
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
1.1	Perencanaan Program dan Pengelolaan Administrasi Keuangan
1.2.	Pelayanan Persidangan dan Hubungan Masyarakat
1.3.	Pelayanan Tata Usaha dan Administrasi Umum
1.4.	Pembinaan Administrasi Kepegawaian Wantannas
1.5	Pengelolaan Asset Wantannas
2.	Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional
2.1.	Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Ketahanan Nasional
2.1.1	Perumusan Kebijakan Ketahanan Nasional
2.1.1.1	Perumusan Kebijakan Kedeputian Sistem Nasional
2.1.1.2	Perumusan Kebijakan Kedeputian Politik dan Strategi
2.1.1.3	Perumusan Kebijakan Kedeputian Pengkajian dan Penginderaan
2.1.1.2	Perumusan Kebijakan Kedeputian Pengembangan
2.1.1.2	Perumusan Kegiatan dan Koordinasi Setjen Wantannas
2.2.	Pengembangan Sistem Informasi Wantannas

C. Rencana Kerja dan Anggaran Setjen Wantannas 2014

1. Rencana Kerja

a. Biro Keuangan

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka Biro Keuangan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- 1) Bagian Perencanaan Anggaran
 - a) Melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) jangka menengah;
 - b) Melaksanakan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan;
 - c) Melaksanakan penyusunan Penetapan Kinerja;
 - d) Melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran;
 - e) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi program;
 - f) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi anggaran;
 - g) Melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- 2) Bagian Administrasi Keuangan
 - a) Melaksanakan pembinaan administrasi keuangan;
 - b) Melaksanakan verifikasi dokumen keuangan;
 - c) Melaksanakan pengarsipan dokumen keuangan;
 - d) Menyusun laporan keuangan semester dan tahunan;
 - e) Melaksanakan monitoring dan evaluasi administrasi keuangan.

b. Biro Persidangan dan Humas

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka Biro Persidangan dan Humas melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Bagian Persidangan
 - a) Menyusun rencana kinerja layanan persidangan;
 - b) Melaksanakan pelayanan persidangan;
 - c) Melaksanakan kegiatan produksi dan reproduksi;
 - d) Melaksanakan layanan rapat koordinasi dengan anggota tetap Wantannas;
 - e) Melaksanakan monitoring dan evaluasi layanan persidangan.
- 2) Bagian Hubungan Masyarakat
 - a) Menyusun rencana kinerja layanan kehumasan;

- b) Melaksanakan pengelolaan hubungan media dan hubungan lembaga;
- c) Melaksanakan pengelolaan bahan publikasi;
- d) Melaksanakan pengelolaan penerjemahan;
- e) Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan infrastruktur sisfo Setjen Wantannas yang meliputi aplikasi, *software*, dan *hardware* jalur komunikasi data;
- f) Melaksanakan kegiatan dan koordinasi pada forum Bakohumas;
- g) Melaksanakan penyusunan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Setjen Wantannas;
- h) Melaksanakan pengelolaan arsip Setjen Wantannas;
- i) Melaksanakan kegiatan fotografi dan videografi;
- j) Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan, serta pendayagunaan bahan pustaka;
- k) Melaksanakan monitoring dan evaluasi layanan kehumasan.

c. Biro Umum

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka Biro Umum melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Bagian Kepegawaian
 - a) Melaksanakan pengadaan pegawai melalui mutasi jabatan dari lintas Kementerian/Lembaga;
 - b) Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai mekanisme dan prosedur meliputi kenaikan pangkat, pensiun, kenaikan gaji berkala, mutasi pegawai, cuti, pengusulan tanda penghargaan, absensi dan pembuatan kartu terkait pegawai serta pelantikan pejabat struktural;
 - c) Melaksanakan pengelolaan tata naskah kepegawaian dan dokumen kepegawaian sesuai dengan mekanisme dan prosedur;
 - d) Melaksanakan pemutakhiran data pegawai dan verifikasi data;
 - e) Melaksanakan pengiriman personil untuk mengikuti diklat struktural (Pim Tk.II 1 orang & Pim Tk.IV 2 orang) dan diklat teknis (17 orang);
 - f) Melaksanakan *Assesment Test* untuk promosi ke Eselon IV (5 orang);
 - g) Melaksanakan monitoring dan evaluasi layanan kepegawaian.

- 2) Bagian Rumah Tangga
 - a) Melaksanakan pembinaan pengadaan barang/jasa;
 - b) Melaksanakan pengadministrasian BMN dan barang persediaan;
 - c) Melaksanakan belanja modal yang terdiri dari pengadaan peralatan pendukung kinerja;
 - d) Melaksanakan pemeliharaan gedung kantor tempat kerja, kendaraan dinas dan peralatan kantor lainnya;
 - e) Mengadakan obat-obatan untuk poliklinik Wantannas;
 - f) Mengadakan pakaian dinas pegawai;
 - g) Mengadakan pakaian kerja tenaga keamanan, kebersihan, pramubakti dan pengemudi;
 - h) Melaksanakan pembayaran belanja pegawai dan tenaga honorer (keamanan, kebersihan, pramubakti dan pengemudi);
 - i) Melaksanakan pembayaran langganan daya dan jasa;
 - j) Melaksanakan monitoring dan evaluasi layanan kerumahtanggaan.
- 3) Bagian Administrasi Umum
 - a) Menyelenggarakan kegiatan naskah dinas persuratan;
 - b) Mengelola arsip yang meliputi perawatan dan pemeliharaan arsip;
 - c) Melaksanakan pengawasan kegiatan tata naskah dinas persuratan;
 - d) Melaksanakan dukungan operasional pimpinan/ketua lembaga;
 - e) Melaksanakan dukungan kesekretariatan;
 - f) Melaksanakan monitoring dan evaluasi layanan administrasi umum.

d. Deputi Sistem Nasional

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka Kedeputian Sistem Nasional melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan data, identifikasi masalah dan pembentukan Panitia Kerja

Melaksanakan pembentukan panitia kerja, merumuskan tema, dan menyusun Term of Reference (TOR) Kajian melalui pengumpulan data dan identifikasi masalah serta didukung dengan kegiatan pengkajian daerah (Kajida).

- 2) Penyusunan kajian, kirpat, dan semiloka bidang sistem nasional
Melaksanakan penyusunan kajian bidang sistem nasional melalui kegiatan rapat kerja terbatas (Rakertas), penyusunan naskah perkiraan cepat (Kirpat) terkait masalah krusial mendesak, dan pelaksanaan seminar lokakarya (Semiloka) atas naskah kajian hasil kerjasama dengan mitra kerja.
- 3) Evaluasi dan pelaporan
Melaksanakan rapat finalisasi naskah kajian melalui kegiatan rapat kelompok kerja khusus (Pokjasus) dan rapat permusan materi (Ramusmat).

e. Deputi Politik dan Strategi

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka Kedeputian Politik dan Strategi melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan data, identifikasi masalah dan pembentukan Panitia Kerja
Melaksanakan pembentukan panitia kerja, merumuskan tema, dan menyusun Term of Reference (TOR) Kajian melalui pengumpulan data dan identifikasi masalah serta didukung dengan kegiatan pengkajian daerah (Kajida).
- 2) Penyusunan kajian, kirpat, dan semiloka bidang politik dan strategi
Melaksanakan penyusunan kajian bidang politik dan strategi melalui kegiatan rapat kerja terbatas (Rakertas), penyusunan naskah perkiraan cepat (Kirpat) terkait masalah krusial mendesak, dan pelaksanaan seminar lokakarya (Semiloka) atas naskah kajian hasil kerjasama dengan mitra kerja.
- 3) Evaluasi dan pelaporan
Melaksanakan rapat finalisasi naskah kajian melalui kegiatan rapat kelompok kerja khusus (Pokjasus) dan rapat permusan materi (Ramusmat).

f. Deputi Pengkajian dan Penginderaan

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka Kedeputian Pengkajian dan Penginderaan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan data, identifikasi masalah dan pembentukan Panitia Kerja
Melaksanakan pembentukan panitia kerja, merumuskan tema, dan menyusun Term of Reference (TOR) Kajian melalui pengumpulan data dan identifikasi masalah serta didukung dengan kegiatan pengkajian daerah (Kajida).

- 2) Penyusunan kajian, kirpat, dan semiloka bidang pengkajian dan penginderaan

Melaksanakan penyusunan kajian bidang pengkajian dan penginderaan melalui kegiatan rapat kerja terbatas (Rakertas), penyusunan naskah perkiraan cepat (Kirpat) terkait masalah krusial mendesak, dan pelaksanaan seminar lokakarya (Semiloka) atas naskah kajian hasil kerjasama dengan mitra kerja.

- 3) Evaluasi dan pelaporan

Melaksanakan rapat finalisasi naskah kajian melalui kegiatan rapat kelompok kerja khusus (Pokjasus) dan rapat permusan materi (Ramusmat).

g. Deputi Pengembangan

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka Kedeputian Pengembangan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan data, identifikasi masalah dan pembentukan Panitia Kerja

Melaksanakan pembentukan panitia kerja, merumuskan tema, dan menyusun Term of Reference (TOR) Kajian melalui pengumpulan data dan identifikasi masalah serta didukung dengan kegiatan pengkajian daerah (Kajida).

- 2) Penyusunan kajian, kirpat, dan semiloka bidang pengembangan

Melaksanakan penyusunan kajian bidang pengembangan melalui kegiatan rapat kerja terbatas (Rakertas), penyusunan naskah perkiraan cepat (Kirpat) terkait masalah krusial mendesak, dan pelaksanaan seminar lokakarya (Semiloka) atas naskah kajian hasil kerjasama dengan mitra kerja.

- 3) Evaluasi dan pelaporan

Melaksanakan rapat finalisasi naskah kajian melalui kegiatan rapat kelompok kerja khusus (Pokjasus) dan rapat permusan materi (Ramusmat).

h. Perumusan Kegiatan dan Koordinasi Setjen Wantannas

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka Setjen Wantannas melaksanakan perumusan kegiatan dan koordinasi sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pembentukan panitia kerja dalam rangka Rapat Koordinasi Wantannas, Reformasi Birokrasi dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
- 2) Melaksanakan Rapat Koordinasi Wantannas, Kajian Kewilayahan, Seminar Nasional/Internasional, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Strategi Nasional Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi.

- 3) Melaksanakan rapat evaluasi dan pelaporan atas kegiatan Rapat Koordinasi Wantannas, Kajian Kewilayahan, Seminar Nasional/Internasional, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

i. Pengembangan Sistem Informasi Wantannas

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan secara cepat, akurat dan aman perlu didukung dengan sistem teknologi informasi yang handal, maka Setjen Wantannas melaksanakan pengembangan sistem informasi Wantannas melalui kegiatan pengembangan jaringan sistem informasi Wantannas.

2. Rincian Rencana Kerja dan Anggaran

Anggaran untuk pelaksanaan seluruh Rencana Kerja Setjen Wantannas TA. 2014 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar **Rp 31.049.505.000,-** (Tiga puluh satu milyar empat puluh sembilan juta lima ratus lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a. Berdasarkan jenis belanja, terdiri dari :

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1) Belanja Pegawai | : Rp 7.182.754.000,- |
| 2) Belanja Barang | : Rp 21.771.861.000,- |
| - Belanja Barang Ops. | : Rp 4.848.820.000,- |
| - Belanja Brg Non Ops. | : Rp 16.923.041.000,- |
| 3) Belanja Modal | : <u>Rp 2.094.890.000,-</u> |
| Jumlah : Rp 31.049.505.000,- | |

b. Berdasarkan jenis program :

1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

- | | |
|--|----------------------------|
| Tugas Teknis Lainnya Wantannas: | Rp 13.818.405.000,- |
| a) Pengelolaan Gaji, Lembur & Honor | Rp 7.182.754.000,- |
| b) Penyusunan Rencana Kerja | Rp 213.950.000,- |
| c) Pelayanan Persidangan & Humas | Rp 256.840.000,- |
| d) Pelayanan Tata Usaha & Adminu | Rp 936.510.000,- |
| e) Pembinaan Adm. Kepegawaian | Rp. 320.341.000,- |
| f) Pengelolaan Asset Wantannas | Rp. 4.908.010.000,- |

2) Program Pengembangan Kebijakan

- | | |
|---|----------------------------|
| Ketahanan Nasional: | Rp 17.231.100.000,- |
| a) Perumusan Kebijakan Ketahanan Nasional | Rp 15.028.200.000,- |

- | | | | |
|-----|--|-----|-----------------|
| (1) | Perumusan Kebijakan Kedeputian
Sistem Nasional | Rp | 3.448.436.000,- |
| (2) | Perumusan Kebijakan Kedeputian
Politik dan Strategi | Rp | 3.358.801.000,- |
| (3) | Perumusan Kebijakan Kedeputian
Pengkajian Pengindraan | Rp | 3.414.220.000,- |
| (4) | Perumusan Kebijakan Kedeputian
Pengembangan | Rp | 3.413.975.000,- |
| (5) | Perumusan Kegiatan dan Koordinasi
Wantannas | Rp | 1.392.768.000,- |
| b) | Pengembangan Sisfo Wantannas | Rp. | 2.202.900.000,- |

BAB IV PENUTUP


Rencana Kinerja Tahunan Setjen Wantannas Tahun 2014 yang berisi tentang detail sasaran, strategi pencapaian program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun merupakan pedoman bagi unit-unit kerja Setjen Wantannas dalam menyelenggarakan pembangunan setjen Wantannas tahun 2014. Di samping itu dengan ditetapkannya indikator-indikator kinerja dari kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga dapat diukur capaian kinerjanya sekaligus memudahkan untuk mengadakan evaluasi keberhasilan dan kegagalan.

Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergisme dan keterpaduan dari unit-unit kerja yang ada melalui pemantapan sistem dan metoda perencanaan, peningkatan kualitas SDM, penataan kelembagaan dan peningkatan koordinasi antara instansi terkait. Dengan demikian hal-hal yang dapat menjadikan kendala ataupun hambatan dapat disesuaikan dengan baik.

Jakarta, 2 Oktober 2013

Sekretaris Jenderal
Dewan Ketahanan Nasional




Waris
Letnan Jenderal TNI

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN

Kementerian/Lembaga : Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
Tahun : 2014

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya peningkatan kinerja manajemen internal dalam rangka pelaksanaan tugas Setjen Wantannas	Opini BPK terhadap laporan keuangan Setjen Wantannas	WTP
	Nilai hasil evaluasi Kemen Pan & RB terhadap pelaksanaan kinerja Setjen Wantannas	CC
	Persentase pejabat yang telah melaporkan LHKPN	100 Persen
	Persentase dokumen program dan anggaran yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen
	Persentase unit kerja yang telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan	100 Persen
Tersedianya saran tindak kebijakan ketahanan nasional fokus pada bidang <i>defence, security, crisis prevention and resolution</i> secara komprehensif sebagai masukan Ketua Wantannas (Presiden RI)	Persentase saran tindak hasil kajian dinamis, siklus dan perkiraan cepat bidang kebijakan ketahanan nasional	100 Persen
	Persentase respon Presiden terhadap saran tindak Setjen Wantannas yang disampaikan kepada Presiden	80 Persen

Jakarta, Oktober 2013

Sekretaris Jenderal
Dewan Ketahanan Nasional

Waris
Letnan Jenderal TNI



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I KEMENTERIAN/LEMBAGA

Unit Organisasi Eselon I : **Kedeputian Sistem Nasional**
Tahun Anggaran : **2014**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terselenggaranya kajian Dinamis secara komprehensif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen Wantannas, yang dilakukan melalui pengamatan, evaluasi, analisis dan perumusan sistem nasional serta penjabarannya ke dalam sub-sub sistemnya dalam rangka pembinaan ketahanan nasional, sebagai bahan masukan kebijakan nasional kepada Presiden RI selaku Ketua Wantannas.	Jumlah saran tindak strategis bidang sistem nasional	12 Naskah
	Jumlah saran tindak hasil perkiraan cepat bidang sistem nasional	10 Naskah
	Jumlah kajian hasil semiloka terkait permasalahan daerah yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam penyelesaian masalah nasional bidang sistem nasional	1 Naskah
	Jumlah laporan hasil pengkajian daerah terkait permasalahan daerah yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam penyelesaian masalah nasional	7 Laporan
	Persentase saran tindak kebijakan ketahanan nasional bidang sistem nasional yang dikirim ke Presiden	70 Persen

Jakarta, Oktober 2013

Deputi Sistem Nasional
Setjen Wantannas

Drs. Tahan SL Toruan, MM Dipl. SS
Mayor Jenderal TNI



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL

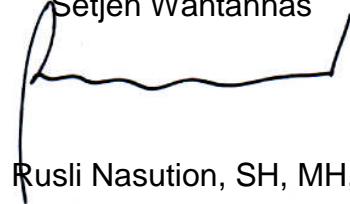
FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I KEMENTERIAN/LEMBAGA

Unit Organisasi Eselon I : **Kedeputan Politik dan Strategi**
Tahun Anggaran : **2014**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terselenggaranya kajian Siklis maupun Dinamis secara komprehensif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen Wantannas, yang dilakukan melalui pengamatan, evaluasi, analisis dan perumusan politik strategi nasional serta rencana kontijensi	Jumlah saran tindak strategis bidang politik dan strategi	8 Naskah
	Jumlah dokumen siklis (Renkonnas)	1 Naskah
	Jumlah saran tindak hasil perkiraan cepat bidang politik dan strategi	10 Naskah
	Jumlah kajian hasil semiloka terkait permasalahan daerah yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam penyelesaian masalah nasional bidang politik dan strategi	1 Naskah
	Jumlah naskah hasil pengkajian daerah terkait permasalahan daerah yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam penyelesaian masalah nasional	7 Naskah
	Persentase saran tindak kebijakan ketahanan nasional bidang politik dan strategi yang dikirim ke Presiden	70 Persen

Jakarta, Oktober 2013

Deputi Politik dan Strategi
Setjen Wantannas


Drs. Rusli Nasution, SH, MH, MM
Inspektur Jenderal Polisi



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL

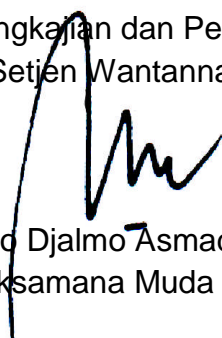
FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I KEMENTERIAN/LEMBAGA

Unit Organisasi Eselon I : **Kedeputian Pengkajian dan Penginderaan**
Tahun Anggaran : **2014**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terselenggaranya kajian Siklis maupun Dinamis secara komprehensif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen Wantannas, yang dilakukan melalui pengkajian dan penginderaan strategis nasional, regional, dan internasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional sebagai masukan dan saran tindak kepada Ketua Wantannas (Presiden RI)	Jumlah saran tindak strategis bidang pengkajian dan penginderaan	8 Naskah
	Jumlah dokumen siklis (Apstranas, Kirstranas)	2 Naskah
	Jumlah saran tindak hasil perkiraan cepat bidang pengkajian dan penginderaan	10 Naskah
	Jumlah kajian hasil semiloka terkait permasalahan daerah yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam penyelesaian masalah nasional bidang pengkajian dan penginderaan	1 Naskah
	Jumlah laporan hasil pengkajian daerah terkait permasalahan daerah yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam penyelesaian masalah nasional	7 Laporan
	Persentase saran tindak kebijakan ketahanan nasional bidang pengkajian dan penginderaan yang dikirim ke Presiden	70 Persen

Jakarta, Oktober 2013

Deputi Pengkajian dan Penginderaan
Setjen Wantannas


Ir. Eko Djalmo Asmadi, MH
Laksamana Muda TNI



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

**FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I KEMENTERIAN/LEMBAGA**

Unit Organisasi Eselon I : **Kedeputian Pengembangan**
Tahun Anggaran : **2014**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terselenggaranya kajian Dinamis secara komprehensif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen Wantannas, yang dilakukan melalui pengamatan, evaluasi, analisis dinamika segenap aspek kehidupan nasional dan pelaksanaan pembangunan nasional serta perumusan saran pemecahan krisis dan saran pemecahan masalah penyimpangan pembangunan nasional yang terjadi	Jumlah saran tindak strategis bidang pengembangan	12 Naskah
	Jumlah saran tindak hasil perkiraan cepat bidang pengembangan	10 Naskah
	Jumlah kajian hasil semiloka terkait permasalahan daerah yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam penyelesaian masalah nasional bidang pengembangan	1 Naskah
	Jumlah laporan hasil pengkajian daerah terkait permasalahan daerah yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam penyelesaian masalah nasional	7 Laporan
	Persentase saran tindak kebijakan ketahanan nasional bidang pengembangan yang dikirim ke Presiden	70 Persen

Jakarta, Oktober 2013

Deputi Pengembangan
Setjen Wantannas

Edy Sunarwondo
Marsekal Muda TNI



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II KEMENTERIAN/LEMBAGA

Unit Organisasi Eselon II : **Biro Keuangan**
Tahun Anggaran : **2014**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terselenggaranya perencanaan anggaran dan administrasi keuangan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen Wantannas melalui upaya pembinaan anggaran dan keuangan.	Persentase unit kerja yang mengajukan perencanaan kegiatan tahunan secara tepat waktu	100 Persen
	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang dapat diselesaikan tepat waktu	100 Persen
	Persentase unit kerja yang menyampaikan laporan pelaksanaan program dan anggaran secara tepat waktu	100 Persen
	Persentase tagihan pertanggung jawaban keuangan yang dapat diselesaikan tepat waktu	100 Persen
	Jumlah laporan keuangan yang transparan dan akuntabel yang dapat diselesaikan tepat waktu	2 laporan
	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP

Jakarta, Oktober 2013

Kepala Biro Keuangan
Setjen Wantannas

Edy Purwanto
Brigadir Jenderal TNI



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

**FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II KEMENTERIAN/LEMBAGA**

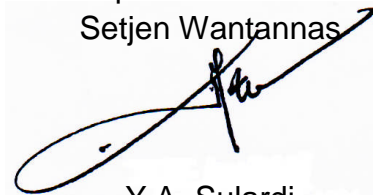
Unit Organisasi Eselon II : **Biro Umum**
Tahun Anggaran : **2014**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terlaksananya penyelenggaraan administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan dan administrasi umum	Persentase penilaian dan peningkatan kemampuan SDM	100 Persen
	Persentase pengawakan personel yang dibutuhkan organisasi sesuai Daftar Susunan Personel (DSP)	80 Persen
	Jumlah pegawai yang telah mengikuti assessment	5 orang
	Persentase pegawai yang lulus dari pendidikan dan pelatihan struktural dan teknis dengan predikat baik	100 Persen
	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian secara tepat waktu	100 Persen
	Persentase ketersediaan tata naskah dan dokumen kepegawaian	100 Persen
	Persentase tingkat kehadiran pegawai	100 Persen
	Persentase data personil yang mutakhir dan valid	100 Persen
	Persentase sarana dan prasarana yang tersedia sesuai dengan jumlah pegawai	90 Persen
	Persentase BMN dalam kondisi baik (layak pakai)	100 Persen
	Persentase tingkat kepuasan pegawai	80 Persen

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
	terhadap sarana dan prasarana yang ada	
	Jumlah laporan BMN yang transparan dan akuntabel yang dapat diselesaikan tepat waktu	3 laporan
	Jumlah layanan pengelolaan belanja pegawai tepat waktu	12 bulan
	Persentase dokumen administrasi persuratan dan ekspedisi yang dapat diselesaikan tepat waktu	100 Persen
	Jumlah layanan keprotokoleran dan kesekretariatan	12 bulan

Jakarta, Oktober 2013

Kepala Biro Umum
Setjen Wantannas



Y.A. Sulardi
Brigadir Jenderal TNI



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II KEMENTERIAN/LEMBAGA

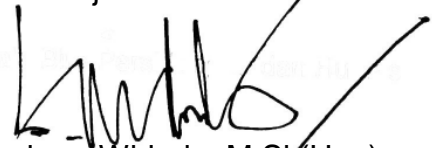
Unit Organisasi Eselon II : **Biro Persidangan dan Humas**
Tahun Anggaran : **2014**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terselenggaranya pengelolaan persidangan dan kehumasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok Setjen Wantannas	Persentase pengelolaan dan penatausahaan layanan persidangan yang efektif dan efisien	100 Persen
	Persentase bahan/materi hasil sidang yang diproduksi dan direproduksi	100 Persen
	Persentase pengelolaan dan penatausahaan layanan kehumasan yang efektif dan efisien	100 Persen
	Persentase publikasi/ pemberitaan tentang kegiatan Setjen Wantannas	100 Persen
	Jumlah naskah MoU dengan K/L terkait	6 Naskah
	Persentase Rapat Koordinasi dan Forum Bakohumas yang terlaksana	80 Persen
	Persentase digitalisasi arsip dan perpustakaan yang lengkap dan mutakhir	80 Persen
	Persentase dokumen yang diupload di website Setjen Wantannas	100 Persen
	Jumlah pengunjung website Setjen Wantannas	110 org/hari
Terselenggaranya Pengelolaan Rapat Koordinasi Sidang Wantannas	Jumlah laporan pelaksanaan Rapat Koordinasi Sidang Wantannas	1 Laporan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terselenggaranya pengelolaan jalur komunikasi data yang aman dan mutakhir dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok Setjen Wantannas	Peringkat hasil evaluasi Kemen Kominfo terhadap pelaksanaan manajemen keamanan informasi Setjen Wantannas	5
	Persentase penggunaan aplikasi Sisfo Setjen Wantannas	50 Persen

Jakarta, Oktober 2013

Kepala Biro Persidangan dan Humas
Setjen Wantannas



Susiswo Widodo, M.Si (Han)
Brigadir Jenderal TNI